PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Jenderal Sudirman No 19

TANAH GROGOT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 1 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanah Grogot, 31 Januari 2024

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

SUGIANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 3
II. NERACA 4
III. LAPORAN OPERASIONAL 5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 7
A. PENJELASAN UMUM 7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 15
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 19
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 24
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 28
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA 30
G. LAMPIRAN DAN DAFTAR 33

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

JALAN JEND SUDIRMAN NO.19 TANAH GROGOT

TELEPON/FAXIMILE 0543 21155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah Grogot, 31 Januari 2024

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

SUGIANTO

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 14.781.499 atau mencapai 129 persen. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.747.063.601 atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.924.845.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 16.595.168.134 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 3.488.000, Aset Tetap (neto) sebesar Rp 16.590.693.134 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 987.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 15.895.462 dan Rp 16.579.272.672.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 12.893.499, jumlah beban adalah juga sebesar Rp 4.684.591.967 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 4.671.698.468. Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa sebesar Rp 1.888.000 dan sehingga entitas masih pada posisi Defisit-LO sebesar Rp 4.669.810.468.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 16.579.272.672. Untuk Ekuitas Awal sebesar Rp 17.803.392.551, kemudian dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 4.669.810.468 kemudian dikurangi Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp 320.210.763 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3.765.901.352 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 16.579.272.672.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% thd Angg	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.439.000	14.781.499	129	14.305.932
JUMLAH PENDAPATAN		**11.439.000**	**14.781.499**	**129**	**14.305.932**
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	2.746.236.000	2.572.236.615	94	2.863.413.290
Belanja Barang	B.3	1.168.609.000	1.165.186.986	100	1.156.872.594
Jumlah Belanja Operasi		**3.914.845.000**	**3.737.423.601**	**95**	**1.977.677.179**
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.4	10.000.000	9.640.000	96	86.794.641
Jumlah Belanja Modal		**10.000.000**	**9.640.000**	**96**	**86.794.641**
JUMLAH BELANJA		**3.924.845.000**	**3.747.063.601**	**95**	**4.107.080.525**

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.2	0	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.3	0	0
Persediaan	C.4	3.488.000	1.570.900
Jumlah Aset Lancar		**3.488.000**	**1.570.900**
ASET TETAP			
Tanah	C.5	14.452.813.000	14.452.813.000
Peralatan dan Mesin	C.6	2.222.223.108	2.673.284.978
Gedung dan Bangunan	C.7	6.356.791.185	6.356.791.185
Aset Tetap Lainnya	C.8	11.035.147	11.035.147
Akumulasi Penyusutan	C.9	(6.452.169.306)	(5.667.979.947)
Jumlah Aset Tetap		**16.590.693.134**	**17.825.944.363**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	4.850.000	4.850.000
Aset Lain-lain	C.11	497.275.870	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(501.138.870)	(4.850.000)
Jumlah Aset Lainnya		987.000	0
JUMLAH ASET		**16.595.168.134**	**17.827.515.263**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	15.895.462	24.122.712
Uang Muka KPPN	C.14	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.895.462	24.122.712
JUMLAH KEWAJIBAN		**15.895.462**	**494.579.715**
EKUITAS			
Ekuitas	C.15	16.579.272.672	17.803.392.551
JUMLAH EKUITAS		**16.579.272.672**	**17.803.392.551**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**16.595.168.134**	**17.827.515.263**

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	12.893.499	14.305.932
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		12.893.499	14.305.932
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.578.734.915	2.853.130.640
Beban Persediaan	D.3	57.543.300	71.461.900
Beban Barang dan Jasa	D.4	619.940.612	678.182.238
Beban Pemeliharaan	D.5	397.674.126	354.077.430
Beban Perjalanan Dinas	D.6	73.386.298	54.126.541
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	957.312.716	917.417.954
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**4.684.591.967**	**4.928.396.703**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(4.671.698.468)**	**(4.914.090.771)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	1.888.000	**0**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1.888.000	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.888.000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**1.888.000**	**0**
POS LUAR BIASA		**0**	**0**
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**0**	**0**
SURPLUS/DEFISIT LO		**(4.669.810.468)**	**(4.914.090.771)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	**17.803.392.551**	**18.299.570.807**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	**(4.669.810.468)**	**(4.914.090.771)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**0**	**0**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.4	**(320.210.763)**	**(17.758.078)**
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	(320.210.763)	(17.758.078)
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	**3.765.901.352**	**4.435.670.593**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	**(1.224.119.879)**	**(496.178.256)**
EKUITAS AKHIR	E.7	**16.579.272.672**	**17.803.392.551**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 19 Tanah Grogot, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkomitmen dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Peningkatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
7. Peningkatan pelayanan peradilan.
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
9. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang sebelumnya terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), bertransformasi menjadi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dimana aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satker

yang ada sebelumnya. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan fungsi SIMAK-BMN di dalam SAKTI adalah menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah).
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Piutang belum jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampa1 dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;	10%
Diragukan	Piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	50%

Macet	Piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
  b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan · kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
  c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
  d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2018 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2018.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp 14.781.499

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 14.781.499. Pendapatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Estimasi	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	11.439.000	14.781.499	129
Pendapatan Lain-lain	0	0	0

Jumlah	11.439.000	14.781.499	129

Realisasi pendapatan 31 Desember 2023 Diperoleh dari Anggaran Sewa Rumah Dinas.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	14.781.499	14.305.932	9.6
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	14.781.499	14.305.932	9.6

Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp 3.747.063.601

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.747.063.601 atau 95.00 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 3.924.845.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	2.746.236.000	2.572.236.615	94
Belanja Barang	1.168.609.000	1.165.186.986	100
Belanja Modal	10.000.000	9.640.000	96
Jumlah Belanja Kotor	**3.924.845.000**	**3.747.063.601**	95
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	3.924.845.000	3.747.063.601	95

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Realisasi Belanja 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 11 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena beberapa realisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum maksimal, khususnya di belanja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.572.236.615	2.863.413.290	(11)
Belanja Barang	1.165.186.986	1.156.872.594	10
Belanja Modal	9.640.000	86.794.641	(100)
Jumlah	3.747.063.601	4.107.080.525	(11)

B.2. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp 2.572.236.615

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.572.236.615 dan Rp 2.863.413.290. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 12 persen dari 30 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.572.236.615	2.863.413.290	(11)
Belanja Lembur	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	2.572.236.615	2.863.413.290	(11)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai	2.572.236.615	2.863.413.290	(11)

B.3. Belanja Barang

Belanja Barang Rp 1.165.186.986

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.165.186.986 dan Rp 1.156.872.594. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 10 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh pencabutan status pandemi covid-19 di tahun 2023, kemudian adanya kenaikan belanja barang operasional, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	605.798.093	572.265.430	9
Belanja Barang Non Operasional (5212)	5.451.000	0	100,00
Belanja Barang Persediaan (5218)	59.460.400	63.289.800	(11)
Belanja Jasa (5221)	23.417.069	113.113.393	(383)
Belanja Pemeliharaan (5231)	397.674.126	354.077.430	9
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	73.386.298	54.126.541	8
Jumlah Belanja Barang	1.165.186.986	1.156.872.594	10

B.4. Belanja Modal

Belanja Modal Rp 9.640.000

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 9.640.000 dan Rp 86.794.641.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321)	9.640.000	56.825.000	(489)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331)	0	29.969.641	(100)
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	86.794.641	(100)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Modal	9.640.000	86.794.641	(800)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 51.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BRI 653244003021000	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

Belanja dibayar dimuka (prepaid) Rp 0

C.2. Belanja dibayar di muka (prepaid)

Jumlah belanja dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 yang merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Rincian Belanja dibayar di muka(prepaid)adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja dibayar di muka (prepaid)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Gaji pokok PNS	0	0
Belanja pembulatan gaji PNS	0	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp 3.488.000

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 3.488.000 dan Rp 1.570.900.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	3.488.000	1.570.900
Jumlah	3.488.000	1.570.900

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah Rp. 14.452.813.000

C.4. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanah Grogot per Desember 2023 adalah sebesar Rp 14.452.813.000.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	4.000 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 T.Grogot	8.175.960.000
2	1.256 m2	Jl.RM Noto Sunardi Tanah Grogot	2.012.112.000
3	1.200 m2	Jl.RM Noto Sunardi Tanah Grogot	1.904.400.000
4	493 m2	Jl.RA Kartini Tanah Grogot	828.240.000
5	1.007 m2	Jl.Gajah Mada Tanah Grogot	1.532.101.000

Jumlah	14.452.813.000

Peralatan dan Mesin Rp 2.246.082.258

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.699.953.878 dan 2.246.082.258.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	2.699.953.878
Mutasi Tambah	52.345.000
Mutasi Kurang	(506.216.620)
Saldo per 31 Desember 2023	2.246.082.258
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.805.392.710)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	440.689.548

Gedung dan Bangunan Rp 6.377.896.769

C.6. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.377.896.769 dan Rp. 6.377.896.769.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	6.377.896.769
Mutasi Tambah	967.417.128
Mutasi Kurang	(967.417.128)
Saldo per 31 Desember 2023	6.377.896.769
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.665.904.257)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.711.992.512

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1035 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	4.005.391.641
2	72 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	458.520.128
3	104 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	50.346.209

4	14 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	73.707.392
5	253 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	148.500.000
6	79 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	73.446.399
7	153 m2	Jln. Gajah Mada Tanah Grogot	426.209.000
8	90 m2	Jln. Gajah Mada Tanah Grogot	286.207.000
9	73 m2	Jln. R. A. Kartini Tanah Grogot	162.225.000
10	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173.336.000
11	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173.336.000
12	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173.336.000
13	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173.336.000
Jumlah			6.377.896.769

Aset Tetap Lainnya Rp 11.035.147

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah. peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan. irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.035.147 dan Rp 11.035.147. Aset tetap tersebut berupa buku-buku diperpustakaan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 6.471.296.967

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.471.296.967. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.246.082.258	1.805.392.710	440.689.548
2	Gedung dan Bangunan	6.377.896.769	4.665.904.257	1.711.992.512
3	Aset Tetap Lainnya	11.035.147	0	11.035.147

Akumulasi Penyusutan	8.635.014.174	6.471.296.967	2.163.717.207

Aset Tak Berwujud Rp 4.850.000

C.9. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.850.000 dan Rp. 4.850.000.

Aset Lain-lain Rp 497.275.870

C.10. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 497.275.870 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Rp 501.138.870

C.11. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 501.138.870 dan Rp 4.850.000.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 15.895.462

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 15.895.462 dan Rp 24.122.712. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 24.122.712 telah diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada pihak ketiga yang berhak pada Januari 2023.

Ekuitas Rp 16.579.272.672

C.13. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 16.579.272.672 dan Rp 17.803.392.551. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp 14.781.499

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 14.781.499 dan Rp 14.305.932 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	14.781.499	14.305.932
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah	14.781.499	14.305.932

Beban Pegawai Rp 2.572.236.615

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.572.236.615 dan Rp 2.863.413.290. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.572.236.615	2.863.413.290
Jumlah	2.572.236.615	2.863.413.290

Beban Persediaan Rp 59.460.400

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 59.460.400 dan Rp 63.289.800. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa Rp 634.666.162

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 634.666.162 dan Rp 685.378.823. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Belanja Barang Operasional	605.798.093	572.265.430
Beban Belanja Barang Non Operasional	5.451.000	0
Beban Langganan Daya dan Jasa	23.417.069	113.113.393
Jumlah	634.666.162	685.378.823

Beban Pemeliharaan Rp 397.674.126

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 397.674.126 dan Rp 354.077.430 dan Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember *2023 dan 2022*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	249.516.946	203.017.100
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	44.178.520	52.340.027
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.978.660	98.720.303
Jumlah	397.674.126	354.077.430

Beban Perjalanan Dinas

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember

Rp 73.386.298

2022 adalah masing-masing sebesar Rp 73.386.298 dan Rp 54.126.541. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Perjalanan Dinas	73.386.298	54.126.541
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Jumlah	73.386.298	54.126.541

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 956.025.716

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember adalah masing-masing sebesar Rp 956.025.716 dan Rp 917.417.954. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	220.065.779	234.564.496
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	735.959.937	682.853.458
Beban Amortisasi Software	0	0
Jumlah	956.025.716	917.417.954

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 1.888.000

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.888.000 dan Rp 0. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

31 Desember dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Penyesuaian Nilai BMN	1.888.000	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (452122)	1.888.000	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.888.000	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp 17.803.392.551

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 17.803.392.551 dan Rp 18.299.570.807.

E.2. Defisit LO

Defisit LO Rp 4.669.810.468

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.669.810.468 dan Rp 4.914.090.771. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp 0

Terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yaitu Rp 0 dan Rp 0.

E.4.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp 0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp 0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	**0**

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
Jumlah	**0**

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp 320.210.763

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 320.210.763. Nilai Tersebut merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi pencatatan nilai bertambah atas penggabungan Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 1 ke Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1.

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp 0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp 3.765.901.352

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.765.901.352 dan Rp 4.435.670.593 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.747.063.601
Diterima dari Entitas Lain	(14.781.499)
Transfer Masuk	21.630.250
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	11.989.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	**3.765.901.352**

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp 16.579.272.672

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 16.579.272.672 dan Rp 17.803.392.551.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 653244003021000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 654444003031000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.
3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C

021401000730305 a.n RPL 047 PN TANAH GROGOT UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 72.625.842.

F.2. REVISI DIPA

Hingga 31 Desember 2023. Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan 4 kali Revisi DIPA dengan rincian jenis revisi :

1. Ralat Rencana Penarikan Dana (Hal III DIPA) dan Pemuktahiran POK (14 April 2023).
2. Ralat Rencana Penarikan Dana (Hal III DIPA) dan Pemuktahiran POK (9 Oktober 2023).
3. Ralat Rencana Penarikan Dana (Hal III DIPA) dan Pemuktahiran POK (20 November 2023).
4. Ralat Rencana Penarikan Dana (Hal III DIPA) dan Pemuktahiran POK (21 Desember 2023).

F.3. RALAT SPM. SP2D. SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Desember 2023. Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak ada mengajukan ralat SPM. SP2D. SSBP dan SSPB.

F.4. PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI

Hingga 31 Desember 2023. Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum terdapat Nilai Pagu Minus.

F.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Terdapat Kode Akun VS Kode BMN Triwulan III pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebesar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Hal ini merupakan belanja modal peralatan dan mesin berupa Honorarium Pejabat Pengadaan, sudah ditindaklanjuti dengan koreksi pencatatan sesuai Surat Keterangan Nomor: W18-U4/1067.a/PL.04/07/2023 dari Printer NUP 32 menjadi Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada Printer NUP 30 dan 31.

  Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Menjadi	Akun	Nominal (Rp)
27 Juli 2023	Honorarium Pejabat Pengadaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	532111	680.000
Jumlah				680.000

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U4/1786a/KU.01/12/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerima/Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2023. sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	SUGIANTO. SH
Pejabat Pembuat Komitmen	:	SUGIANTO. SH
Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM	:	MUHYIDIN. SH
Bendahara Pengeluaran	:	IRWAN D
Bendahara Penerimaan	:	AGUS MUHARI
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	:	NUR AENAH MAGHVIRA, A.Md.A.B.
Petugas Pengelolaan Aset	:	ARJUDUS SADA ARIHTA ANGKAT, A.Md.

G. LAMPIRAN DAN DAFTAR

LAPORAN PENYUSUTAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2023

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
131111	**Tanah**		**7.956,**	**14.452.813.000,**	**0,**	**14.452.813.000,**
20101	TANAH PERSIL	-	7.956,	14.452.813.000,	0,	14.452.813.000,
132111	**Peralatan dan Mesin**		**453,**	**2.222.223.108,**	**(1.788.586.665,)**	**433.636.443,**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	4,	272.164.117,	(272.164.117,)	0,
30501	ALAT KANTOR	-	72,	121.374.500,	(103.307.300,)	18.067.200,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	292,	694.651.171,	(580.718.365,)	113.932.806,
30601	ALAT STUDIO	-	9,	68.817.820,	(30.226.946,)	38.590.874,
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1,	3.993.000,	(3.993.000,)	0,
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1,	161.260.000,	(104.819.000,)	56.441.000,
31001	KOMPUTER UNIT	-	52,	674.665.910,	(495.352.597,)	179.313.313,
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	22,	225.296.590,	(198.005.340,)	27.291.250,
133111	**Gedung dan Bangunan**		**12,**	**6.356.791.185,**	**(4.663.582.641,)**	**1.693.208.544,**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5,	4.788.806.185,	(3.893.355.062,)	895.451.123,
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	7,	1.567.985.000,	(770.227.579,)	797.757.421,
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**30,**	**11.035.147,**	**0,**	**11.035.147,**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30,	11.035.147,	0,	11.035.147,
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan**		**288,**	**497.275.870,**	**(496.288.870,)**	**987.000,**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2,	2.000.000,	(2.000.000,)	0,
30501	ALAT KANTOR	-	74,	51.875.850,	(51.875.850,)	0,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	155,	107.754.520,	(106.767.520,)	987.000,
30601	ALAT STUDIO	-	14,	66.319.475,	(66.319.475,)	0,
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	3,	20.475.000,	(20.475.000,)	0,
31001	KOMPUTER UNIT	-	20,	176.485.500,	(176.485.500,)	0,
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	20,	72.365.525,	(72.365.525,)	0,
JUMLAH			**8.739,**	**23.540.138.310,**	**(6.948.458.176,)**	**16.591.680.134,**